

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo periode 2017 sampai 2019 . dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil atau dikemukakan antara lain:

1. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun anggaran 2017 sampai 2019 dikategorikan sangat kurang karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%. Artinya kontribusi PAD dalam menyelenggarakan Desentralisasi masih sangat kurang
3. Rasio Efisiensi keuangan daerah tahun anggaran 2017 sampai 2019 tergolong cukup efisien. Karena pada tahun 2017-2019 rasio efisiensinya mengalami penurunan.
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 sampai 2019 memiliki pola hubungan instruktif dimana tingkat ketergantungan pihak ekstern masih sangat tinggi.

5. Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2018 memiliki kriteri efektif artinya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah efektif atau sudah mencapai target. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 belum efektif yang artinya pemerintah belum mencapai target dalam merealisasi PAD nya.
6. Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo meniti beratkan pada belanja operasi yang artinya belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis guna mendukung kemajuan kemampuan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo diharapkan lebih proposional didalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
3. Meningkatnya terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan

nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, Dwi Siswanto. 2010. *Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Derajat Otonomi Pemerintahan Provinsi di Seluruh Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 12, No. 1 Maret 2010, 91-117*
- Adi, Priyo Hary. (2012). *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*.
- Ana, Prihatiningsih. (2010) *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta*.
- Aulia, Zhufinsa Nur Rahmatina. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009. Skripsi*. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Bisma, I Dewa dkk. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal. Gane Swara edisi Khusus Vol. 4 No. 3, Mataram*.
- Budiarto, Bambang. 2011. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya*.
- Farian, Endi. (2010). Skripsi. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten X*.
- Halim, Abdul dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Indra. 2011. *Asas-Asas Otonomi Daerah*. Artikel. <http://elfi-indra.blogspot.com/2011/06/asas-asas-otonomi-daerah.html>. Hal 1. Diakses tanggal 9 Januari 2017.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Leady, Tamboto. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Emba. Universitas Samratulangi Manado. Vol. 2. No. 2. Juni 2014, Hal. 755-767*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: ANDI.

- Pemerintah. R.I. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Royani, Ida. 2012. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://lib.umpo.ac.id/gdl/files/disk1/1/jkptumpo-gdl-idaroyani-24%20abstrak.pdf>. Hal 1-24. Diakses tanggal 9 Januari 2017.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.